

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan investasi *cryptocurrency* di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dalam hukum pidana di Indonesia?, 2) Bagaimanakah kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan Investasi *cryptocurrency* di Indonesia?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statuate approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang melalui *crypto* tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2) Kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan investasi *cryptocurrency* di Indonesia harus terlebih dahulu di legalisasikan untuk dapat dibentuk suatu peraturan yang lebih spesifik. Bertujuan supaya lembaga keuangan seperti OJK dan PPATK dapat mengawasi penggunaan mata uang ini dengan merigistrasi setiap orang yang menggunakannya, serta pemerintah juga perlu merevisi (menambah pasal) atau meregulasi kembali *cryptocurrency* secara khusus sebagai upaya pencegahan penggunaan mata uang ini sebagai modus kejahatan baru di era teknologi.

Kata Kunci : *Cryptocurrency, Pencucian Uang, Mata Uang Virtual*

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal regulations and policies for criminal acts of money laundering through cryptocurrency in Indonesia. The formulation of the problem in this research is 1) What is the regulation regarding the criminal act of money laundering through cryptocurrency in criminal law in Indonesia?, 2) What is the legal policy for the criminal act of money laundering through cryptocurrency investment activities in Indonesia? This thesis uses a normative juridical research method with a statutory research approach, a case approach and a conceptual approach. The results of this research are 1) Regulations regarding the criminal act of money laundering through crypto are not specifically regulated in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, 2) Legal policy for the criminal act of money laundering through cryptocurrency investment activities in Indonesia must first be legalized so that more specific regulations can be formed. The aim is that financial institutions such as the OJK and PPATK can monitor the use of this currency by registering everyone who uses it, and the government also needs to revise (add articles) or re-regulate cryptocurrency specifically as an effort to prevent the use of this currency as a new mode of crime in the technological era. .

Keywords : *Cryptocurrency, Money Laundering, Virtual Currency*